



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 3

TAHUN : 2009

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 8 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 telah diatur tentang Kelurahan;

- b. bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53/Kep/2009 tentang Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan, Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates dan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates, perlu ditinjaulanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 12);
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53/Kep/2009 tentang Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan, Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates dan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 8 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10 A

- (1) Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 - (2) Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat.”
2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11 A

Khusus mengenai keberadaan Tanah Kas Desa dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat dilakukan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat izin Gubernur.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Agustus 2009

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 15 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

S O ‘ I M

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI D**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 8 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG KELURAHAN**

I. UMUM

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya adalah terkait dengan bidang pertanahan dimana terhadap tanah-tanah Kraton Kasultanan dan Kadipaten Paku Alaman yang selama ini belum dilepaskan, masih merupakan domain bebas Kasultanan Yogyakarta-Kadipaten Paku Alaman dan sampai sekarang belum terjangkau ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

Eksistensi atau keberadaan Tanah Kas Desa tidak lepas dari keberadaan kelurahan/desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait erat dengan Kasultanan Yogyakarta. Keberadaan kelurahan/desa menguat sebagai cikal bakal daerah otonom yang akhirnya sebagai suatu sub sistem pemerintahan yang hadir bersamaan dengan dilakukannya reorganisasi Kasultanan Yogyakarta. Dalam masa itu sampai sekarang penghasilan/penggajian para pemimpin di kelurahan/desa dilakukan dengan bentuk penggunaan tanah milik Kasultanan.

Perkembangan selanjutnya kelurahan/desa diakui sebagai badan hukum pribumi dengan adanya kekuasaan dan kebebasan menjalankan roda pemerintahan sendiri dengan kelengkapan pimpinan pemerintahan yang diisi melalui mekanisme pilihan langsung.

Melalui keberadaan kelurahan/desa sebagai suatu daerah yang otonom dan munculnya kebijakan *landreform*, kelurahan/desa diberikan tanah ulayat atau kemudian lebih dikenal dengan istilah Tanah Kas Desa, yang merupakan tanah untuk dimanfaatkan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan dibagi untuk penghasilan/gaji para Lurah/Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam konteks demikian merupakan pemberian Kasultanan Yogyakarta disebut *hak andarbe* atau hak milik. Berawal dari sinilah kaitan historis dengan kraton dan sebagai bagian dari aspek pertanahan yang merupakan salah satu aspek keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perubahan lain yang diakomodir dalam Peraturan Daerah ini adalah penegasan pengisian Lurah dan Perangkat Kelurahan yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil Daerah setelah diusulkan camat. Mekanisme ini perlu ditempuh agar selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

oo00oo

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 4/PB/DPRD/2009
4/PB/VIII/2009

Tanggal : 1 Agustus 2009

Tentang : 1. Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 15
Tahun 2008 tentang Kelurahan;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 16
Tahun 2008 tentang Perubahan Status
Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates;
dan
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
Wates.